



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB : PENUTUP
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. RSUD Datu Sanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- q. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Kecamatan Piani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Kecamatan Lokpaikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan apin Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- ff. Kecamatan Bakarangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Candi Laras Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Hatungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Salam Babaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Tapin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Tapin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Binuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Bungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ss. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**
Pj. BUPATI TAPIN, **7**



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 10



***RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025***

***PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN***



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas taufik dan petunjukNya Rancangan Akhir Rencana Kerja SOPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja SOPD Tahun 2025 ini adalah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD mencakup rincian Program Kerja Tahunan sebagai wujud implementasi dan penjabaran konsep Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yang akan menguraikan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026.

Kami menyadari walaupun rencana kerja ini dapat diselesaikan, namun masih banyak kekurangannya sehingga saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaannya terutama untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja SOPD Tahun 2025 ini.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tapin,



drh. MOHAMMAD TRIASMORO
NIP. 19670825 200604 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	57
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	60
4.1 Program dan Kegiatan	60
BAB V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 2.1.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tapin	16
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapin Dinas Pertanian	39
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya	58
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari musrenbang kecamatan sebagai kelanjutan musrenbang desa sebagai aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);

27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
45. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09); dan
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Dinas Pertanian tahun 2025 Kabupaten Kabupaten Tapin.

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi SKPD Dinas Pertanian untuk jangka waktu satu tahun, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPD Tahun 2024-2026.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian , Tahun 2025 yaitu :

- 1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.
- 2. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang baik dan terukur.
- 3. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Program 18 (delapan belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - b. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
 - c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

III. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam parit
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

V. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

VI. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

VII. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2023 telah menetapkan sebanyak 5 (empat) sasaran strategis dengan 13 (Tiga belas) indikator kinerja yang mana hasil capaiannya adalah 7 indikator sangat baik, 1 tinggi, 1 sedang, 0 rendah dan 3 sangat rendah. Secara keseluruhan rata-rata capaian Kinerja 202,42%.

Adapun berkenaan anggaran, capaian realisasi anggaran sangat rendah yaitu 57,96 % , hal ini disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yg belum dibayar oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023 kepada pihak ketiga sehingga menjadi hutang di tahun 2024. Apabila hutang dinggap sebagai realisasi anggaran 2023 maka capaian kinerja anggaran mencapai 94,76%..

Membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran sebesar menunjukkan adanya tanda efisiensi penggunaan Anggaran.

Tabel 2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Berdasarkan Program Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi
1	2	3	4	5
	3.27 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.953.770.758	16.551.475.610	92,19
	3.27 . 01 . 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.802.340	45.600.000	55,07
	3.27 . 01 . 2.01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.802.340	45.600.000	55,07
	3.27 . 01 . 2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.532.144.626	12.024.479.636	95,95
	3.27 . 01 . 2.01 . 06 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.431.345.882	12.024.479.636	96,73
	3.27 . 01 . 2.02 . 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	39.600.000	100,00
	3.27 . 01 . 2.02 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.198.744	61.171.000	99,95
	3.27 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.999.084.990	2.699.146.494	90,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.551.543	92.745.600	82,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.989.311	298.751.000	76,60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.877.136	19.030.000	32,32
	Penyediaan Bahan/Material	37.392.000	36.150.000	96,68
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.387.500	10.349.000	53,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.380.887.500	2.242.120.894	94,17
	3.27 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.860.956	780.873.080	88,45
	3.27 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.286.450	365.501.000	80,81
	3.27 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.574.506	415.372.080	96,47
	3.27 . 01 . 2.07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.395.380	690.068.944	87,31
	3.27 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.995.380	225.090.104	74,53
	3.27 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.400.000	464.978.840	95,20
	3.27 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.482.466	311.307.456	46,71
	3.27 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.276.386	198.907.456	47,22
	3.27 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.450.000	4.628.000	15,71
	3.27 . 01 . 2.09 . 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.756.080	107.772.000	49,95

	3.27 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.243.988.726	14.980.184.831	39,17
	3.27 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	32.260.950.215	11.990.843.752	37,17
	3.27 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.911.708.075	5.334.021.798	53,82
	3.27 . 02 . 2.01 . 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22.349.242.140	6.656.821.954	29,79
	3.27 . 02 . 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.066.442	302.677.889	96,37
	3.27 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	314.066.442	302.677.889	96,37
	3.27 . 02 . 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.668.972.069	2.686.663.190	47,39
	3.27 . 02 . 2.05 . 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	4.846.399.863	2.151.958.190	44,40
	3.27 . 02 . 2.05 . 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	718.952.246	446.840.000	62,15
	3.27 . 02 . 2.05 . 04 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	103.619.960	87.865.000	84,80
	3.27 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.030.077.804	17.408.722.345	57,97
	3.27 . 03 . 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	115.853.800	94.215.000	81,32
	3.27 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	115.853.800	94.215.000	81,32
	3.27 . 03 . 2.02Pembangunan Prasarana Pertanian	29.914.224.004	17.314.507.345	57,88
	3.27 . 03 . 2.02 . 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.255.280.000	1.523.766.600	67,56
	3.27 . 03 . 2.02 . 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	27.503.400.500	15.647.581.745	56,89

	3.27 . 03 . 2.02 . 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	155.543.504	143.159.000	92,04
	3.27 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.434.814.717	1.061.213.035	73,96
	3.27 . 04 . 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.899.817	228.747.000	91,17
	3.27 . 04 . 2.01 . 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	250.899.817	228.747.000	91,17
	3.27 . 04 . 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.516.226	9.239.800	97,10
	3.27 . 04 . 2.02 . 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.516.226	9.239.800,00	97,10
	3.27 . 04 . 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.871.108	175.685.800	70,88
	3.27 . 04 . 2.03 . 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	247.871.108	175.685.800	70,88
	3.27 . 04 . 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	926.527.566	647.540.435	69,89
	3.27 . 04 . 2.04 . 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	926.527.566	647.540.435	69,89
	3.27 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	827.501.251	576.230.511	69,64
	3.27 . 05 . 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	827.501.251	576.230.511	69,64
	3.27 . 05 . 2.01 . 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	827.501.251	576.230.511	69,64
	3.27 . 06 Program Perizinan Usaha Pertanian	118.085.084	48.415.000	41,00
	3.27 . 06 . 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	118.085.084	48.415.000	41,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan IzinUsaha Pertanian	118.085.084	48.415.000	41,00

	3.27 . 07 Program Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104	1.627.307.762	94,50
	3.27 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104	1.627.307.762	94,50
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	480.363.856	468.370.450	97,50
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	371.341.142	357.622.008	96,31
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	301.646.502	263.313.850	87,29
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	15.665.000	15.665.000	100,00
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	552.915.604	522.336.454	94,47
	Realisasi		52.253.549.094	57,96
	Hutang		33.345.468.827	
	Jumlah	90.330.170.444	85.599.017.921	94,76

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2023 dengan realisasinya, kemudian dikalikan 100% untuk menilai capaiannya.

. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2023

Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	0,10	-0,32	-320,00	Sangat Rendah
Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Padi (Persen)	1,50	-55,26	-3.683,91	Sangat Rendah
	Persentase peningkatan Produksi Jagung (Persen)	1,50	-14,64	-975,96	Sangat Rendah
	Persentase peningkatan Produksi Cabai Rawit Hiyung (Persen)	0,68	6,79	996,17	Sangat Baik
	Persentase peningkatan Produksi Jahe (Persen)	3,03	2,41	79,47	Tinggi
	Persentase peningkatan Produksi Jeruk (Persen)	0,30	2,14	709,29	Sangat Baik
	Persentase peningkatan Produksi Karet (Persen)	1,00	4,08	407,93	Sangat Baik
	Persentase peningkatan Produksi Kelapa Sawit (Persen)	2,00	9,33	466,42	Sangat Baik
	Persentase peningkatan Produksi Daging (Persen)	0,19	7,47	3.925,73	Sangat Baik
	Persentase peningkatan Produksi Telur (Persen)	1,11	8,40	756,91	Sangat Baik
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelompoktani yg meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	20,00	13,99	69,95	Sedang

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	80,00	76,40	95,50	Sangat Baik
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Skor)	40,00	41,6	104,00	Sangat Baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan Pembangunan Pertanian harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana Strategis Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Jangka Menengah untuk tingkat SKPD yang berlaku selama 5 tahun dan dijabarkan kedalam dokumen rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Tapin melaksanakan upaya mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tapin adalah melaksanakan upaya pencapaian Misi Kedua yaitu : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa, Dimana Tujuan Dinas Pertanian adalah : Meningkatkan Sektor Agribisnis” dengan 5 (Lima) Sasaran yaitu :

- 1. LPE Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
- 2. Meningkatkan Produksi Pertanian:
- 3. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian:
- 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 5. Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2023 telah menetapkan sebanyak 5 (empat) sasaran strategis dengan 13 (Tiga belas) indikator kinerja yang mana hasil capaiannya adalah 7 indikator sangat baik, 1 tinggi, 1 sedang, 0 rendah dan 3 sangat rendah. Secara keseluruhan rata-rata capaian Kinerja 202,42%:

Table 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Hingga Tahun 2023
Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Tahun					KUMULATIF CAPAIAN 2019-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 TERHADAP TARGET (%)	CAPAIAN KINERJA 2023 TERHADAP CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	TARGET JANGKA MENENGAH 2019-2023	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (%)
			2019	2020	2021	2022	2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IKU BARU												
I	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	-	-	-	-	0,10	0,10	-0,32	-320,00	-	-0,32	-320,00
II	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan produksi padi (%)	-	-	-4,93	4,22	-55,26	-55,97	1,50	-3.683,91	-1409,45	5,70	-981,98
		Persentase Peningkatan produksi Jagung (%)	-	-	64,96	-65,30	-14,64	-14,98	1,50	-975,96	-77,58	4,00	-374,46
		Persentase Peningkatan Produksi Cabe Rawit Hiyung (%)	-	-	15,24	30,38	6,79	52,41	0,68	996,17	-77,65	4,48	1.169,88

		Persentase Peningkatan Produksi Jahe (%)	-	-	434,64	71,58	2,41	508,63	3,03	79,47	-96,64	45,93	1.107,40
		Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%)	-	-	7,17	6,74	2,14	16,05	0,30	709,29	-68,21	9,00	178,36
		Persentase Peningkatan Produksi Karet (%)	-	-	-6,19	4,33	4,08	2,22	1,00	407,93	-5,79	9,00	24,68
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	-	-	18,92	1,81	9,33	30,06	2,00	466,42	415,38	15,00	200,42
		Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	-	-	38,95	26,33	7,47	72,75	0,19	3.925,73	-71,65	1,10	6.613,35
		Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	-	-	17,92	24,57	8,40	50,89	1,11	756,91	-65,80	8,09	628,91
III	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelompok tani yg meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	-	-	-	-	-	13,99	20,00	-	69,95	20,00	69,95
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	-	-	-	-	-	76,40	80,00	-	95,50	80,00	95,50

V	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Skor)						41,6	40,00	-	104,00	40,00	104,00
	IKU LAMA												
I	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian (%)	0,05	2,70	-3,68	-7,65	-3,60	-12,18	0,1	-3.600,00	-52,94	6,25	-194,88
II	Tercapainya Swasembada Pangan	Jumlah Surplus Beras (Ton)	-	-	279.689	269.305	144.185	693.178,70	144.185	100,00	-46,46	749.184	92,52
II	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi padi (Ton)	418.240	446.269	424.249	442.140	251.669	1.982.566,10	251.669	100,00	-43,08	2.071.384	95,71
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	14.248	4.864	8.024	2.784	2.376	32.296,14	2.376	100,00	-14,64	40.899	78,97
III	Meningkatnya produksi hortikultura	Jumlah Produksi Cabai Rawit Hiyung (Ton)	1.596	1.210	1.394	1.818	1.941	7.959,86	1.941	100,00	6,79	7.339,00	108,46
		Jumlah Produksi Jahe (Ton)	-	-	668,3	1147	947,7	2.763,00	947,7	100,00	-17,38	1.481,00	186,56
		Jumlah Produksi Jeruk (Ton)	19632	24.228	25.965	27.715	18.750	116.289,88	18.750	100,00	-32,35	80.431,00	144,58
IV	Meningkatkan produksi perkebunan	Jumlah Produksi karet (Ton)	7.992	8.678	8.141	8.494	8.840	42.145,52	8.840	100,00	4,08	43.892	96,02
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	27.156	49.059	58.343	59.398	12.988	206.944,15	12.988	100,00	-78,13	332.459	62,25

V	Meningkatnya Produksi Pernakan	Jumlah Produksi Daging (Ton)	4.667	4.960	6.892	8.707	9.357	34.583	9.357	100,00	7,47	23.513	147,08
		Jumlah Produksi Telur (Ton)	6.251	6.440	7.594	9.460	10.255	40.000	10.255	100,00	8,40	32.949	121,40

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor sasaran jangka menengah K/L dan provinsi , implikasi RTRW dan KLHS pada tugas serta aspek lainnya dalam upaya pembanguna pertanian Kabupaten Tapin maka Isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian di kabupaten Tapin adalah :

1. Perluasan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang semakin sulit meningkat
2. karena adanya konversi lahan pertanian serta terjadinya perubahan iklim ;
3. Mutu Hasil Produk Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang
4. belum optimal
5. Masih rendahnya produksi dan produktivitas dan mutu hasil perkebunan
6. Meningkatnya permintaan atas produk pertanian khususnya daging dan telur yang belum
7. diimbangi dengan produksi yang cukup
8. Masih adanya penyakit menular pada ternak
9. Keterbatasan Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana Pertanian
10. Menurunnya Jumlah Petani dan Masih lemahnya kelembagaan petani

Sehingga Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 22 Tahun 2017, disebutkan bahwa Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. penyusunan program penyuluhan pertanian;
3. pengembangan prasarana pertanian;
4. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
6. pembinaan produksi di bidang pertanian;
7. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

8. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
9. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Rancangan RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.3

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tapin
Dinas Pertanian

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	DINAS PERTANIAN				121.634.456.825,00					121.634.456.825,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				111.988.211.325,00					111.988.211.325,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	22.916.018.608,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	22.916.018.608,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	82.790.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	82.790.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	16 Laporan	82.790.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	16 Laporan	82.790.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	13.277.187.891,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	13.277.187.891,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	122 Orang/bulan	13.176.375.791,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	122 Orang/bulan	13.176.375.791,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	2 Dokumen	100.812.100,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	2 Dokumen	100.812.100,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	6.695.731.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	6.695.731.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	142.085.300,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	142.085.300,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	335.273.900,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	335.273.900,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	58.378.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	58.378.600,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	4 Paket	37.351.800,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	4 Paket	37.351.800,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	17.238.200,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	17.238.200,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	6.105.403.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	6.105.403.600,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1.494.844.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1.494.844.400,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	50 Unit	1.494.844.400,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	50 Unit	1.494.844.400,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	817.603.160,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	817.603.160,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	395.952.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	395.952.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	421.650.360,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	421.650.360,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	547.861.757,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	547.861.757,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	120 Unit	517.475.855,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	120 Unit	517.475.855,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	30.385.902,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	30.385.902,00	

2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	29.920.133.632,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	29.920.133.632,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	-	17.883.158.102,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	-	17.883.158.102,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 Laporan	5.929.757.280,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 Laporan	5.929.757.280,00	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	1 Laporan	1.050.685.442,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	1 Laporan	1.050.685.442,00	
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>	0 Ton	1.027.160.100,00	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>	0 Ton	1.027.160.100,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>	1 Laporan	1.552.561.540,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>	1 Laporan	1.552.561.540,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>	1 Laporan	3.494.489.900,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>	1 Laporan	3.494.489.900,00	

	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>	0 Batang	1.391.969.500,00	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>	0 Batang	1.391.969.500,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i>	1 Laporan	2.637.427.440,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i>	1 Laporan	2.637.427.440,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura</i>	1 Laporan	799.106.900,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura</i>	1 Laporan	799.106.900,00	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	143.259.600,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	143.259.600,00	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	1 Laporan	143.259.600,00	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	1 Laporan	143.259.600,00	

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	11.893.715.930,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	11.893.715.930,00	
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</i>	0 Ton	1.893.736.000,00	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</i>	0 Ton	1.893.736.000,00	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>	1 Laporan	182.148.600,00	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>	1 Laporan	182.148.600,00	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i>	1 Laporan	9.817.831.330,00	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i>	1 Laporan	9.817.831.330,00	
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	41.752.079.162,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	41.752.079.162,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		-	-	6.322.164.162,00	Pengembangan Prasarana Pertanian		-	-	6.322.164.162,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					

		Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan	237.553.000,00		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan	237.553.000,00	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	0 Unit	315.867.782,00	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	0 Unit	315.867.782,00	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola</i>	0 Dokumen	3.385.404.480,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola</i>	0 Dokumen	3.385.404.480,00	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian</i>	1 Dokumen	2.383.338.900,00	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian</i>	1 Dokumen	2.383.338.900,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-	35.429.915.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-	35.429.915.000,00	

		Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	50 Unit	28.549.830.000,00		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	50 Unit	28.549.830.000,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	0 Unit	71.598.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	0 Unit	71.598.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Tapin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	10 Unit	6.808.487.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	10 Unit	6.808.487.000,00	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	5.089.474.264,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	5.089.474.264,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	27.716.300,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	27.716.300,00	

	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>	0 Laporan	27.716.300,00	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>	0 Laporan	27.716.300,00	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	215.548.300,00	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	215.548.300,00	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM</i>	0 Laporan	215.548.300,00	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM</i>	0 Laporan	215.548.300,00	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	2.235.470.654,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	2.235.470.654,00	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>	0 Laporan	2.235.470.654,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>	0 Laporan	2.235.470.654,00	

	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		-	-	159.607.700,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		-	-	159.607.700,00	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik</i>	0 Unit Usaha	159.607.700,00	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik</i>	0 Unit Usaha	159.607.700,00	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		-	-	2.451.131.310,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		-	-	2.451.131.310,00	
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>	0 Unit	2.451.131.310,00	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>	0 Unit	2.451.131.310,00	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	-	2.993.406.479,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	-	2.993.406.479,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-	-	2.993.406.479,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-	-	2.993.406.479,00	

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	0 Ha	1.169.788.120,00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	0 Ha	1.169.788.120,00	
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	0 Ha	1.367.269.100,00	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	0 Ha	1.367.269.100,00	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	0 Laporan	456.349.259,00	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	0 Laporan	456.349.259,00	
6.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		-	-	524.245.300,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		-	-	524.245.300,00	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	524.245.300,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	524.245.300,00	

	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>	1 Dokumen	144.862.800,00	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>	1 Dokumen	144.862.800,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>	1 Laporan	379.382.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>	1 Laporan	379.382.500,00	
7.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	8.792.853.880,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	8.792.853.880,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	-	8.792.853.880,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	-	8.792.853.880,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	0 Unit	639.320.200,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	0 Unit	639.320.200,00	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	0 Unit	484.369.320,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	0 Unit	484.369.320,00	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	0 Unit	2.970.644.900,00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	0 Unit	2.970.644.900,00	

	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	0 Unit	280.968.500,00	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	0 Unit	280.968.500,00	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					
		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>	0 Orang	2.642.228.200,00		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>	0 Orang	2.642.228.200,00	
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota					Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	0 Unit	784.033.250,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	0 Unit	784.033.250,00	

	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>	0 Unit	92.881.500,00	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>	0 Unit	92.881.500,00	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i>	1 Dokumen	898.408.010,00	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i>	1 Dokumen	898.408.010,00	
	NON URUSAN				9.646.245.500,00	NON URUSAN				9.646.245.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.646.245.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.646.245.500,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	9.646.245.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	9.646.245.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	9.646.245.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	9.646.245.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	14 Unit	9.646.245.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	14 Unit	9.646.245.500,00	
					121.634.456.825,00					121.634.456.825,00	

Tabel 2.4

**DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	STATUS	VOLUME	SATUAN
1	709696	27-02-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani Paku Tembus Baruh Kapar Desa Banua Hanyar	Jalan Perintis Raya RT 01 RW 01 Desa Banua Hanyar Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	500	Meter
2	709887	28-02-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT 01 Desa Banua Hanyar	Jalan Perintis Raya RT 01 RW 01 Desa Banua Hanyar Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
3	710033	28-02-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Pembuatan Jalan Tani RT 04Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat	Desa Bataratat RT 04 Kecamatan Lokpaikat, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1000	Meter
4	715083	28-02-2024	H. DEDY ARIEF BUDIMAN, SE. MM	Kondisi jalan masih belum layak untuk akses petani mengangkut hasil kebun	DESA LABUNG RT 2 RW 1 KECAMATAN TAPIN TENGAH (samping rumah syamsudin), Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	380	METER
5	744948	03-03-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Penyelesaian Jalan Usaha Tani RT 03 - RT 04 RW 02	RT 03 - RT 04 RW 02 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	500	Meter
6	744988	03-03-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Pembuatan Jalan Usaha Tani Badaun Muara Tapus Desa Badaun	Desa Badaun Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	150	Meter
7	745004	03-03-2024	H.MUHAMMAD BASERI	Pembuatan Jalan Usaha Tani Jl. Pengadilan 2 RT .003 RW.002 (Lanjutan)	Jl. Pengadilan 2 RT .003 RW.002 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara., Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	150	Meter

8	745110	03-03-2024	ROBBY APRIANDIE, SM	PEMBUATAN JALAN TANI RT 02 RW 01 DESA LABUNG	DESA LABUNG RT 02 RW 01 KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
9	745118	03-03-2024	ROBBY APRIANDIE, SM	REHAB JALAN TANI (COR BETON) DESA PARIGI KACIL RT 03 RW 02	DESA PARIGI KACIL RT 03 RW 02 KECAMATAN BAKARANGAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
10	751313	04-03-2024	H.GILANG FIRDAUS HELMI,S.Pd.MM	PENINGKATAN JALAN TANI DESA SUNGAI PUTING	RT.004 RW.002 (RAI II HANYAR) DESA SUNGAI PUTING KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	300	meter
11	752617	04-03-2024	H. DEDY ARIEF BUDIMAN, SE. MM	Akses jalan belum memadai untuk mengangkut hasil pertanian	DESA TIRIK RT 3 KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	300	METER
12	755558	05-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembuatan JUT.KT Telok Bayor Peningkatan Jalan Tani Desa Labung Panjang 500m	Desa Labung RT. 004 kec Tapin Tengah Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	500	Meter
13	755665	05-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembuatan JUT.KT Tinggiran Peningkatan Jalan Tani Desa Labung Panjang 500m	Desa Labung RT. 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	500	m
14	756846	05-03-2024	ISMAIL	Jalan untuk petani mengangkut hasil panen rusak berat dan tidak layak dilalui kendaraan bermotor	DESA TIMBUNG RT.01 DAN RT 02 KEC. BUNGUR , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Dibatalkan	1	1 M2
15	756877	05-03-2024	ISMAIL	Jalan yang di lalui petani untuk mengangkut hasil panen rusak berat dan tidak layak di lalui kendaraan bermotor	DESA TIMBUNG RT 01 DAN RT.02 KEC. BUNGUR , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2

16	764597	06-03-2024	H.GILANG FIRDAUS HELMI,S.Pd.MM	PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERTANIAN SUNGAI KULANDA DESA SAWAJA	RT.003 RW.002 DESA SAWAJA KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1500	meter
17	769562	06-03-2024	ISMAIL	UNTUK MELANJUTKAN JALAN YANG DI BANGUN AGAR SESUAI HARAPAN MASYARAKAT DARI BLOK D KE BLOK B	DESA AYUNAN PAPAN RT 04 RW 02 KECAMATAN LOKPAIKAT, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
18	769699	06-03-2024	H. MISLAN	PERMOHONAN PEMBANGUNAN JALAN TANI RABAT BETON	JALAN AMPU RT 02 RW 01 DESA ASAM RANDAH KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	500	METER
19	769814	06-03-2024	ISMAIL	TIDAK ADA AKSES PETANI UNTUK MENGANGKUT HASIL PANEN	DESA AYUNAN PAPAN RT 05 RW 02 KECAMATAN LOKPAIKAT, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
20	771909	07-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani Dengan Ukuran jalan Panjang : 200 meter Lebar : 2 meter	Desa linuh RT.01 RW.01 Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
21	772066	07-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani Cor Vaving Rabat Beton Dengan Panjang 300 meter dan Lebar 2 meter	Jl. A. Yani Desa Bungur Baru RT. 04 RW.02 Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	300	Meter
22	772114	07-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani	Tebing Tinggi Desa Bungur Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Dibatalkan	1	paket
23	772222	07-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani Dengan Ukuran Jalan : Lebar 2 meter dan Panjang 200 meter	Desa Linuh Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter

24	772326	07-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani	haturax Kel. Kupang Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Dibatalkan	1	Paket
25	773059	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Rehab Jalan Tani Pulijau Desa Bundung RT. 001 Dengan panjang 400 Meter dan Lebar 2 Meter	Desa Bundung RT. 001 Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
26	773152	07-03-2024	H. HAIRUJI	Rehab jalan tani dengan panjang : 600 meter Lebar : 2 meter	Jalan Marthagiri Rt.001.Rw.001 Desa Kalumpang Kec. Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	600	Meter
27	773330	07-03-2024	H. HAIRUJI	Lanjutan jalan tani Dengan Ukuran Jalan : Lebar 2 meter dan Panjang 200 meter	Desa Rantau Bujur Kec. Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
28	773331	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Rehabilitasi Pembuatan Jalan Tani RT. 004 Desa Tangkawang Baru	Desa Tangkawang Baru RT. 004 Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	buah
29	773945	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembangunan dan Cor Paving Jalan Usaha Tani RT. 001 Desa Pematang Karangan Samping Gudang denan panjang +- 280 Meter x 2 Meter	Desa Pematang Karangan RT. 001 Kec Tapin Tengah Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
30	774490	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Lanjutan Jalan Tani Desa Tirik RT. 003 Dengan Panjang 200 Meter Dan Lebar 2 Meter	Desa Tirik Rt. 003 Kac. Tapin Tengah Kab Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
31	774993	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Bantuan Jalan Tani Desa Tirik RT. 02 Kec Tapin Tengah Kab Tapin	Desa Tirik RT. 002 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah

32	775111	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Cor Paving Jalan Usaha Tani RT. 003 Desa Pematang Karang dengan Panjang +- 41,5 Meter, +-910 Meter dan Lebar 2 Meter, 1,5 Meter	Desa Pematang Karang RT. 003 Timbuk Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
33	775850	07-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Cor Paving Jalan Usaha Tani RT. 001 Samping SDN Pematang karang dengan Panjang +- 557 Meter Lebar 1,5 Meter	Desa Pematang Karang RT. 001 Samping SDN Pematang Karang Kac. Tapin Tengah Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
34	780671	07-03-2024	H. YAMANI, S.Ak	Jalan Produksi Kelompok Tani Sejahtera Desa Suato Baru RT. 02 RW. 01 Kec. Salam Babaris	Desa Suato Baru Kec Salam Babaris, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	700	M
35	780720	07-03-2024	H. YAMANI, S.Ak	Jalan Produksi Kelompok Tani Bumi Kencana Desa Suato Baru RT. 03 RW. 02 Kec. Salam Babaris	Desa Suato Baru Kec Salam Babaris, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
36	784975	08-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Permohonan bantuan 1 unit hand traktor quick rotary sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan ekonomi masyarakat	Desa Sukaramai, RT. 01, Kecamatan Tapin Tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	unit
37	785592	08-03-2024	H. NASRULLAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI (Panjang ; 200 M x Lebar : 2 M)	JL. BUNGUR BARU RT.004 RT.002 DESA BUNGUR BARU KECAMATAN BUNGUR, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	400	METER PERSEGI
38	786657	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jalan Tani RT.04 Desa Parigi Kecil	Desa Parigi Kecil RT.04, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
39	786666	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jalan Tani Samping Sungai dan Samping Sawah Abang Herman Desa Paul	Desa Paul, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket

40	786676	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jalan Tani Samping Sawah Bapa Ubas dan Dekat Jembatan Timbuk Hanyar Desa Paul	Desa Paul Samping Sawah Bapa Ubas dan Dekat Jembatan Timbuk Hanyar , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
41	786691	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jalan Tani Samping Rumah Yadi Gboy dan Samping Makam Kermat Datu Saroni Desa Paul	Desa Paul Samping Rumah Yadi Gboy dan Samping Makam Keramat Datu Saroni , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
42	786703	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jembatan Samping Sawah Handeri Desa Paul	Desa Paul Samping Sawah Handeri , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
43	786718	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Hasil dan Menunjang Produksi Hasil Pertanian perlu Pengadaan Alsintan Combine Harvester Kelompok Tani Desa Buas Buas Hilir	Desa Buas Buas Hilir, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
44	786753	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Hasil dan Menunjang Produksi Hasil Pertanian perlu Pengadaan Alsintan Chainsaw Kelompok Tani Desa Buas Buas Hilir	Ds. Buas Buas Hilir, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
45	786773	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Tani RT.03 Sungai Rutas Hulu sudah rusak perlu Peningkatan	Ds. Sungai Rutas Hulu, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
46	786793	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Peningkatan Jalan Tani Sungai Rimba Sungai Rutas Hulu sudah rusak perlu Peningkatan	Jalan Tani Sungai Rimba Desa Sungai Rutas Hulu, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
47	786820	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Hasil dan Menunjang Produksi Hasil Pertanian perlu Pengadaan Alsintan Combine Harvester Kelompok Tani	Desa Pariok, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket

				Desa Pariok					
48	786826	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Hasil dan Menunjang Produksi Hasil Pertanian perlu Pengadaan Alsintan Traktor Kelompok Tani Desa Waringin	Desa Waringin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
49	786835	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Tani Belakang Rumah Fira Desa Bakarangan sudah rusak perlu Pembangunan / Peningkatan	Belakang Rumah Fira Desa Bakarangan, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
50	786850	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Usaha Tani Wilayah Nyiur Tunggal Desa Pematang Karangan RT 01 RW 01 perlu dilanjutkan	Desa Pematang Karangan , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
51	786856	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Akses dan Distribusi Hasil Pertanian perlu Pembangunan Jalan Tani Desa Sungai Rutas	Desa Sungai Rutas, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
52	786862	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Akses dan Menunjang Distribusi Hasil Pertanian perlu Pembangunan Jalan Tani Khalik Desa Sungai Rutas	Desa Sungai Rutas, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
53	786870	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Akses dan Menunjang Distribusi Hasil Pertanian perlu Pembangunan Jalan Tani Desa Pandahan RT 7 Matang Sunkai	Desa Pandahan RT 7 Matang Sunkai, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket

54	786877	08-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Untuk Meningkatkan Akses dan Menunjang Distribusi Hasil Pertanian perlu Pembangunan Jalan Tani Dayat Gandis Desa Pematangkarangan Hulu	Desa Pematangkarangan Hulu, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
55	787579	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	PEMBUATAN JALAN TANI COR BETON KELOMPOK TANI PENERUS SAMPING KANAN, RT. 006 RW.003 DESA TIMBAAN, KECAMATAN TAPIN SELATAN	JALAN TANI KELOMPOK TANI PENERUS SAMPING KANAN DI DESA TIMBAAN RT. 006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
56	787604	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	PEMBUATAN JALAN TANI PADANG KELOMPOK TANI SINAR PAGI DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN	KELOMPOK TANI SINAR PAGI DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
57	787657	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	PEMBUATAN LANJUTAN JALAN TANI PENERUS SAMPING KIRI KELOMPOK TANI PENERUS RT.006 DESA TIMBAAN, KECAMATAN TAPIN SELATAN	KELOMPOK TANI PENERUS RT.006 DESA TIMBAAN, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
58	787729	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	PEMBUATAN JEMBATAN TANI KELOMPOK TANI KELADAN RT.006 RW.003 DESA TIMBAAN, KECAMATAN TAPIN SELATAN	KELOMPOK TANI KELADAN RT.006 RW.003 DESA TIMBAAN, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	2	METER

59	787744	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	PEMBUATAN JEMBATAN SUNGAI KELADAN KELOMPOK TANI KELADAN DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN	KELOMPOK TANI KELADAN DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	2	METER
60	787797	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	LANJUTAN PEMBUATAN COR BETON JALAN TANI KELADAN DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN	KELOMPOK TANI KELADAN DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
61	787827	08-03-2024	WAHYU NUGROHO RANORO, S.AB. MM	PEMBANGUNAN EMBUNG NES 8B KT. GEREASI MUDA SUATO DESA SUATO LAMA KECAMATAN SALAM BABARIS 10 M	DESA SUATO LAMA RT.14 RW.04 KEL. SUATO LAMA KEC. SALAM BABARIS KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	10	M
62	787833	08-03-2024	Hj. HENNY YULIANTI	REHAB JEMBATAN TANI SUNGAI IDRIS KELOMPOK TANI RUHUI RAHAYU DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN	SUNGAI IDRIS KELOMPOK TANI RUHUI RAHAYU DESA TIMBAAN RT.006 RW.003, KECAMATAN TAPIN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	4	METER
63	788088	08-03-2024	WAHYU NUGROHO RANORO, S.AB. MM	UPGRADE BLOWER DAN PELEBARAN KANDANG AYAM NES 8B KT. GENERASI MUDA SUATO DESA SUATO LAMA KECAMATAN SALAM BABARIS 25 M	DESA SUATO LAMA RT.14 RW.04 KEL. SUATO LAMA KEC. SALAM BABARIS KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	25	M

64	789275	08-03-2024	ISMAIL	JALAN SEMPIT TIDAK LAYAK DILALUI KENDARAAN SEHINGGA PETANI SULIT MENGANGKUT HASIL PANEN	DESA BANUA HALAT KIRI KECAMATAN TAPIN UTARA, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
65	789378	08-03-2024	ISMAIL	JALAN RUSAK SEHINGA PETANI SULIT MENGANGKUT HASIL PANEN	DESA JINGAH BABARIS RT. 01 KECAMATAN TAPIN UTARA, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
66	789645	08-03-2024	WAHYU NUGROHO RANORO, S.AB. MM	PEMBANGUNAN EMBUNG RW.03 BAGO DESA KEMBANG HABANG LAMA KECAMATAN SALAM BABARIS 10 M	DESA KEMBANG HABANG LAMA RW.03 KEL. KEMBANG HABANG LAMA KEC. SALAM BABARIS KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	10	M
67	790478	09-03-2024	H. NASRULLAH	LANJUTAN PEMBUATAN JALAN USAHA TANI (LEBAR 2 METER)	DESA BUNGUR BARU RT.04 RW.002 KEC. BUNGUR (BELAKANG RUMAH RT.04), Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
68	791188	09-03-2024	MUKHTAR	Pembuatan Jalan Tani Desa Waringin RT. 04 Kecamatan Bakarangan	Desa Waringin Kec. Bakarangan, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
69	791612	09-03-2024	H. DARITANIANSYAH	Peningkatan Jalan Produksi RT. 03 Desa Budi Mulia Kec. Lokpaikat	Desa Budi Mulia Kec Lokpaikat, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
70	791642	09-03-2024	H. DARITANIANSYAH	Peningkatan Jalan Produksi RT. 10 Desa Lokpaikat Kec. Lokpaikat	Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
71	791913	09-03-2024	H. NASRULLAH	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani (lebar 2 Meter)	Desa Bungur Baru RT.004 RW.004 Kecamatan Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER

72	792325	09-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembuatan Jalan Tani Kai Anum Desa Waringin Dengan Panjang +- 300 Meter dan Lebar 2 Meter	Jl. Syekh Salman Al-Farisi Desa Waringin RT. 004 Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
73	792350	09-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pengecoran Jalan Tani Darkuni Desa Waringin RT. 004 Dengan Panjang +- 250 Meter dan Panjang 2 Meter	Jl Batung RT 004 Desa Waringin Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
74	792385	09-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembuatan Jalan Tani Amang Razi Desa Waringin RT. 004 Dengan Panjang +- 300 Meter dan Lebar 2 Meter	Desa Waringin RT. 004 Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
75	792429	09-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pengecoran Jalan Tani H. Undum Desa Waringin RT. 004 Dengan Panjang +-250 Meter dan Lebar 2 Meter	Jl. Batung RT. 004 Desa Waringin Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
76	794893	09-03-2024	H. M. RIAN JAYA, SE	Pembuatan Jalan Tani Desa Pematang Karang Hulu RT.06 Kecamatan Tapin Tengah	Desa Pematang Karang Hulu Kec Tapin Tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
77	795089	09-03-2024	ISMAIL	JALAN RUSAK TIDAK LAYAK DILALUI PETANI UNTUK MENGANGKUT HASIL PANEN SEHINGGA PERLU PENGECORAN DIJALAN TERSEBUT	DESA SHABAH KECAMATAN BUNGUR, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
78	795131	09-03-2024	H. DEDY ARIEF BUDIMAN, SE. MM	Akses jalan belum memadai maka diperlukan jalan tani dengan panjang 200 Meter	Desa Tirik RT 3 RW 2 Kecamatan Tapin Tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER
79	795146	09-03-2024	H. HAIRUJI	Bantuan Hand Tractor Gapoktan Pesisir Talikur untuk mempermudah dalam Pertanian	Desa Linuh Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Unit

80	795166	09-03-2024	ISMAIL	JALAN RUSAK DAN TIDAK LAYAK DI LALUI KENDARAAN SEHINGGA PERLU DI ASPAL	DESA LABUHAN RT 008 RW 003 KECAMATAN TAPIN UTARA, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	1 M2
81	795294	09-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan jalan Tani Akses menuju jalan Area Perkebunan Dengan Ukuran : Lebar 2 meter dan Panjang 100 meter di Desa Rantau Bujur (Limpana)	Desa Rantau Bujur (Limpana) Kec. Bungur , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	100	Meter
82	795352	09-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani Menuju akses jalan Area Pertanian Dengan Ukuran Jalan : Lebar 2 meter dan Panjang 200 meter	Desa Rantau Bujur (limpana) Kec. Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	Meter
83	795728	09-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Permohonan bantuan lanjutan Jalan Tani Desa Tirik, Dengan Panjang 500m x lebar 2m	Desa Tirik Rt.03 rw.02 Kec.tapin tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
84	795939	10-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	PEMBANGUNAN DAN COR PAVING JUT RT 001 HANTUTUNG DESA PEMATANG KARANGAN DENGAN PANJANG +-645 M DAN LEBAR 2 M	HANTUTUNG DESA PEMATANG KARANGAN RT. 001 KEC. TAPIN TENGAH KAB. TAPIN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	BUAH
85	796318	10-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Andhika RT.03, RW.02 Dengan Panjang 200m x Lebar 2m (estimasi)	Desa Andhika Rt.03, Rw.02, Kec.Tapin Tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Buah
86	796355	10-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	Permohonan Bantuan Pembuatan Jalan Usaha Tani TUKUNG Kelompok Tani SINAR MURNI II Rt.002, Rw.001 Desa Pandulangan Dengan Volume Panjang 200m x Lebar 2m (Estimasi)	Desa Pandulangan Rt.002, Rw.001,Kec.Tapin Tengah, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	BUAH

87	796371	10-03-2024	H. RAJUDIN NOOR, S.Sos. M.AP	Pembangunan Jalan Tani RT. 05 Kel. Karang Putih Kec. Binuang	Kel Karang Putih Kecamatan Binuang, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
88	796401	10-03-2024	H. RAJUDIN NOOR, S.Sos. M.AP	Jalan Tani RT. 01 Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang	Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
89	796425	10-03-2024	H. RAJUDIN NOOR, S.Sos. M.AP	Jalan Tani Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan	Desa Rumintin Kec Tapin Selatan, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
90	796432	10-03-2024	H. RAJUDIN NOOR, S.Sos. M.AP	Jalan Tani (Bahrul) Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan	Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Unit
91	796623	10-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Tani RT.04 Desa Sungai Rutas Hulu masih kurang dan perlu dibuatkan jalan untuk Meningkatkan Akses dan Menunjang Distribusi Hasil Pertanian	Desa Sungai Rutas Hulu, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
92	796627	10-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Usaha Tani Julak Nayan RT.04 RW 02 Desa Hiyung masih belum selesai dan perlu Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani	Desa Hiyung RT.04 RW 02, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
93	796634	10-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	belum ada Jalan Tani Desa Bakarangan tembus Desa Batang Lantik	Desa Bakarangan RT.01, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
94	796714	10-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	PEMBUATAN JALAN TANI DESA KEPAYANG RT. 002 DENGAN PANJANG 750 M DAN LEBAR 2 M	DESA KEPAYANG RT. 002 KEC. TAPIN TENGAH. KAB TAPIN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	BUAH
95	796925	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pembuatan Tabat Sungai Untuk Pengairan Sawah Kelompok Tani Hutan Labuhan RT. 007 RW. 003 Kel. Rangda Malingkung	Kel Rangda Malingkung Kec Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket

96	796949	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pembangunan Jembatan Cor Beton Jalan Tani Matarau Hulu RT. 009 RW. 003 Kel. Rangda Malingkung	Kelurahan Rangda Malingkung Kec Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Unit
97	796965	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pembuatan Jalan Tani Hutan Matarau Hulu RT. 009 RW. 003 Kel. Rangda Malingkung	Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
98	796972	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Siring dan Cor Jalan Gang Komplek Haur Kuning RT. 009 RW. 003 Kel. Rangda Malingkung Kelompok Tani Hutan Bastam	Kel Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
99	796999	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Jalan Produksi (JUT) RT. 04 RW. 02 Desa Keramat Kec. Tapin Utara	Desa Keramat Kec Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
100	797089	10-03-2024	H. IHWANUDDIN HUSIN SE, SH	Jalan Tani Alkah H.M Ardi kondisi rusak ringan	Desa Sungai Salai Hilir RT. 04, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
101	797184	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Penyusunan Kajian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat dan Piani, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
102	797186	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pengadaan Bantuan Herbisida untuk Perkebunan, Hortikultura dan Tanaman Pangan	Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat dan Piani, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
103	797198	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pengadaan Bantuan Fungisida untuk Perkebunan dan Hortikultura	Tapin Utara, Lokpaikat, Piani dan Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket
104	797202	10-03-2024	H. MIDPAY SYAHBANI	Pengadaan Bantuan Insektisida untuk Hortikultura dan Tanaman Pangan	Bungur, Lokpaikat, Piani dan Tapin Utara, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	Paket

105	799759	10-03-2024	H.GILANG FIRDAUS HELMI,S.Pd.MM	PEMBANGUNAN JALAN TANI RT.01 DESA BARINGIN A	RT.001 TEMBUS KEJALAN PASAR MARGASARI DESA BARINGIN A KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	250	meter
106	799769	10-03-2024	H.GILANG FIRDAUS HELMI,S.Pd.MM	PEMBANGUNAN JALAN TANI TEMBUS RT.001 KE JALAN ALTERNATIF MARGASARI BARU RT.004	RT.001 KE JALAN ALTERNATIF MARGASARI BARU RT.004 DESA BARINGIN A KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	350	meter
107	799825	10-03-2024	H. ZAINAL HELMI NOOR, SE	JALAN TANI RT.002 RW.001 DESA HIYUNG	RT.002 RW.001 DESA HIYUNG KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	paket
108	799876	10-03-2024	H. ZAINAL HELMI NOOR, SE	LANJUTAN JALAN TANI ABAH AMAL RT.002 RW.003 DESA HIYUNG	RT.002 RW.003 DESA HIYUNG KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	paket
109	799898	10-03-2024	H. ZAINAL HELMI NOOR, SE	JALAN TANI COR BETON RT.003 RW.001 DESA PANDAHAN	RT.003 RW.001 DESA PANDAHAN KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	paket
110	800183	10-03-2024	H. ZAINAL HELMI NOOR, SE	PEMBUATAN/PENINGKATAN JALAN TANI DESA TANGKAWANG BARU RT.002 RW.001	RT.002 RW.001 DESA TANGKAWANG BARU KECAMATAN BAKARANGAN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	paket
111	800248	10-03-2024	Hj. HERNY MUSTIKA	PEMBUATAN JALAN TANI H. UNDUM DESA WARINGIN RT. 004 DENGAN PANJANG 300 M DAN LEBAR 2 M	JL. SYEKH SALMAN AL FARISI DESA WARINGIN RT. 004 KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	BUAH

112	800341	10-03-2024	H. ZAINAL HELMI NOOR, SE	PERMOHONAN PEMBANGUNAN JALAN TANI DESA PEMATANG KARANGAN HILIR RT.004 RW.002 YAMANI	JALAN TANI YAMANI RT.004 RW.002 DESA PEMATANG KARANGAN HILIR KECAMATAN TAPIN TENGAH, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	1	paket
113	802023	11-03-2024	H. HAIRUJI	pembuatan jalan tani dengan ukuran 200 x 2 meter (proposal menyusul)	Tebing Tinggi Desa Bungur Kec. Bungur, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	meter
114	802091	11-03-2024	H. HAIRUJI	Pembuatan Jalan Tani 200 x 2 meter (proposal menyusul)	haturax kel. kupang kec. tapin utara , Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	meter
115	802177	11-03-2024	H. NASRULLAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI (JUT) LEBAR 2 METER	SAMPING RUMAH SUYATNO RT.07 KEC.LOKPAIKAT, Kab. Tapin	Dinas Pertanian	Validasi Mitra Bappeda	200	METER

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu Visi dan Misi Pembangunan Pangan oleh Kementerian Pertanian periode 2019 – 2024 adalah :

Visi : pangan Berdaulat, Petani Sejahtera, Indonesia Menuju Lumbung Pangan 2045

Misi :

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Industri Pangan
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani
4. Mewujudkan Revolusi mental dan Reformasi Birokrasi

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pangan dan Pertanian 2019-2024 adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan ketersediaan dan ekspor pangan
2. Meningkatkan lapangan kerja
3. Mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan kesejahteraan petani

Sasaran Strategis :

1. Indonesia berdaulat pangan
2. Lapangan kerja meningkat/ pengangguran menurun
3. Kemiskinan menurun
4. Kesejahteraan petani meningkat

Sedangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pembangunan pertanian **Provinsi Kalimantan Selatan** pada RKPD Provinsi 2025 adalah sebagai berikut :

Visi

KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

Misi

Adapun misi terkait pertanian adalah pada Misi 2 *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata*,

Tujuan

Dengan Tujuan *Meningkatnya perekonomian Daerah*
(Indikatornya meningkatnya LPE (Laju Pertumbuhan ekonomi)

Sasaran

Adapun sasarannya adalah *Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata Tersedianya Produksi Tanaman Pangan Utama*

3. 2.Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapin tersebut tersebut ditetapkan Tujuan dan sasaran Dinas Petanian adalah sebagai berikut :

Tujuan : LPE Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian:
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian:
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran pada tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Serta Target Indikator Sasaran Pada
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	0,10
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Padi (Persen)	1,50
		Persentase peningkatan Produksi Jagung (Persen)	1,50
		Persentase peningkatan Produksi Cabai Rawit Hiyung (Persen)	0,69
		Persentase peningkatan Produksi Jahe (Persen)	0,63
		Persentase peningkatan Produksi Jeruk (Persen)	0,07
		Persentase peningkatan Produksi Karet (Persen)	1,00
		Persentase peningkatan Produksi Kelapa Sawit (Persen)	2,00
		Persentase peningkatan Produksi Daging (Persen)	0,20
		Persentase peningkatan Produksi Telur (Persen)	1,13
3	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelompoktani meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	23,00

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	80,00
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Skor)	50,00

MASUKAN PENJELASAN TABEL DARI SIPD (BERIKUT RANCANGAN TAHUN n+1)

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program Dinas Pertanian Kabupaten Tapin merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dijabarkan Dinas Pertanian ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian .

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rumusan Rancangan akhir program dan kegiatan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Table 4.1

RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2025 KABUPATEN TAPIN DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						133.434.456.822,00							128.490.552.941,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						125.216.211.322,00							117.997.423.275,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						125.216.211.322,00							117.997.423.275,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90% Pelaporan Kinerja (AKIP) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perencanaan Kinerja (AKIP)	-			100 Persen 12 Skor 20 Skor 24 Skor	23.174.988.758,00						-	20.120.180.938,00	

	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti</i>	-			100 Persen 100 Persen	82.790.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Masyarakat	-	91.069.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				16 Laporan	82.790.000,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		91.069.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase Surat Pertanggungjaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	-			100 Persen 100 Persen	13.277.187.891,00			Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Masyarakat	-	14.284.138.804,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				122 Orang/bulan	13.176.375.791,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		14.173.245.494,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				2 Dokumen	100.812.100,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		110.893.310,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas</i>	-			-	6.695.731.400,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	3.392.314.750,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	142.085.300,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		154.951.170,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	335.273.900,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		340.329.770,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	58.378.600,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		64.216.460,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	37.351.800,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		41.086.980,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	17.238.200,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		189.462.020,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6.105.403.600,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		2.602.268.350,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Tercatat Sesuai Dengan Realisasi Fisik dan Keuangan	-			-	1.494.844.400,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	834.612.020,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	1.494.844.400,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		834.612.020,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.076.333.728,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	986.783.880,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	654.683.368,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		440.648.202,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	421.650.360,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		546.135.678,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	547.861.757,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	531.262.484,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				120 Unit	517.475.855,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		516.394.622,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	30.385.902,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		14.867.862,00	DINAS PERTANIAN

2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			0,05 Persen 0,07 Persen 0,10 Persen 0,27 Persen 0,50 Persen 0,51 Persen 0,60 Persen 0,63 Persen 0,70 Persen 1,00 Persen 12,60 Persen 1,50 Persen 2,50 Persen 3,00 Persen 5,00 Persen 8,00 Persen	39.054.963.282,00						4,40 Kg/Kapita/Tahun	32.912.146.995,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	26.866.957.852,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembena- han sistem distribusi	-	-	19.671.473.912,00	DINAS PERTANIAN

												bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan				
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	13.929.757.030,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		6.522.733.008,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1.050.685.442,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.155.753.986,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0 Ton	1.027.160.100,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.129.876.110,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														

			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				1 Laporan	2.552.561.540,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembena h an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.707.817.694,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>				1 Laporan	3.478.289.900,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		3.843.938.890,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				0 Batang	1.391.969.500,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.531.166.450,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	2.637.427.440,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.901.170.184,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				1 Laporan	799.106.900,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		879.017.590,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Ternak Persentase Peserta Bimbingan Teknis Yang Direkomendasikan Untuk Dibina Peserta Pembinaan Yang Meningkatkan Populasi Ternaknya</i>	-			0,3 Persen 0,3 Persen 0,3 Persen	293.269.500,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	157.585.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				1 Laporan	293.269.500,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		157.585.560,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Inseminator Bersertifikat ATR</i> <i>Persentase Kelahiran Insemenasi Buatan Pada Sapi</i>	-			0,2 Persen 1,2 Persen	11.893.715.930,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	13.083.087.523,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			<i>Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</i>				0 Ton	1.893.736.000,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.083.109.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														

			<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>				1 Laporan	182.148.600,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		200.363.460,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i>				1 Laporan	9.818.851.330,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		10.799.614.463,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produksi</i>	100,00 Persen			100,00 Persen	45.386.279.359,00						100,00 Persen	45.927.287.078,00	

	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Persentase Usulan Sarana dan Prasarana Yang Di Setujui</i>	-			-	6.322.164.162,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenh an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	6.954.380.578,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	237.553.000,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenh an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		261.308.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														

			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				0 Unit	315.867.782,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		347.454.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>				0 Dokumen	3.385.404.480,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		3.723.944.928,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														

			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	2.383.338.900,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.621.672.790,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Jalan Produksi Yang Diusulkan Masyarakat Persentase Pemenuhan Jalan Usaha Tani Yang Diusulkan Masyarakat	-			100 Persen 100 Persen	39.064.115.197,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	38.972.906.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				55 Unit	29.184.030.197,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		31.404.813.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	71.598.000,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		78.757.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				7 Unit	9.808.487.000,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		7.489.335.700,00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase Hewan Bebas Penyakit</i>	-			-	5.089.474.264,00						-	5.598.421.690,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Terpenuhi nya Obat Dan Vaksin Rasio Terpenuhi nya Medis Dan Paramedis Veteriner</i>	-			-	27.716.300,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	30.487.930,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														

			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				0 Laporan	27.716.300,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		30.487.930,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	215.548.300,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Optimalisas i perlindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat	-	-	237.103.130,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02. 0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														

			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM</i>				0 Laporan	215.548.300,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Optimalisas i perlindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat	-		237.103.130,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.235.470.654,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	2.459.017.719,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														

			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				0 Laporan	2.235.470.654,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.459.017.719,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	159.607.700,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	175.568.470,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04. 0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														

			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik</i>				0 Unit Usaha	159.607.700,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		175.568.470,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-			-	2.451.131.310,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	2.696.244.441,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														

			<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>				0 Unit	2.451.131.310,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembena h an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.696.244.441,00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Dibawah Ambang Batas (Perkebunan)</i> <i>Persentase Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Dibawah Ambang Batas (Tanaman Pangan)</i>	1,5 % 2,5 % 2,5 %			1,5 Persen 2,5 Persen	3.193.406.479,00						1,5 % 2,5 % 2,5 %	3.292.747.126,00	

	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	2.993.406.479,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	3.292.747.126,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	1.169.788.120,00	Kab. Tapan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.286.766.932,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>				0 Ha	1.367.269.100,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		1.503.996.010,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>				0 Laporan	656.349.259,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		501.984.184,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase Perijinan Yang Dipenuhi</i>	100 Persen			100 Persen	524.245.300,00						100 Persen	576.669.830,00	

	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	524.245.300,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	576.669.830,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>				1 Dokumen	144.862.800,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		159.349.080,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														

			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	379.382.500,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenh an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		417.320.750,00	DINAS PERTANIAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Yang Berkompeten Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	84,76 % 100 %			25 Persen 3 Persen	8.792.853.880,00						84,76 % 100 %	9.569.969.618,00	

	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Media Penyuluhan Yang Didistribusikan Persentase Peserta Bimbingan Teknis Dengan Nilai Postes Baik Persentase Peserta Bimbingan Teknis Penyuluhan Yang Mendapatkan Sertifikat</i>	-			100 Persen 73 Persen 100 Persen	8.792.853.880,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-	-	9.569.969.618,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Unit	639.320.200,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		703.252.220,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				12 Unit	484.369.320,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		532.806.252,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				23 Unit	2.970.644.900,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		3.267.709.390,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				28 Unit	280.968.500,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		309.065.350,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01. 0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	2.642.228.200,00	Kab. Tapi n, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		2.906.451.020,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01. 0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Unit	784.033.250,00		PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		862.436.575,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>				0 Unit	92.881.500,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

			<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i>				1 Dokumen	898.408.010,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pembinaan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	-		988.248.811,00	DINAS PERTANIAN
	X	NON URUSAN						8.218.245.500,00							10.493.129.666,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						8.218.245.500,00							10.493.129.666,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.218.245.500,00						-	10.493.129.666,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-			-	8.218.245.500,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	10.493.129.666,00	DINAS PERTANIAN
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	8.218.245.500,00	Kab. Tapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		10.493.129.666,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							133.434.456.822,00							128.490.552.941,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pertanian, penyusunan Rancangan Akhir Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pertanian maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Tahun 2025.

